

Korupsi Pemilu Legislatif 2014

“Pemantauan Atas Politik Uang, Politisasi Birokrasi dan Penggunaan Sumber Daya Negara Dalam Pemilu 2014”

INDONESIA CORRUPTION WATCH





Makna Pemilu

- ❑ Dari sisi rakyat, pemilu adalah mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada mereka yang hendak memegang kekuasaan di pemerintahan.
- ❑ Dari sisi elit, pemilu adalah mekanisme pergantian pemegang kekuasaan, secara periodik dan tertib.
- ❑ Pemilu juga bisa diartikan sebagai mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat kedalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka, dan beradab.
- ❑ Secara normatif, pemilu diartikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

➤ Problem Integritas Pemilu



✓ Maraknya Praktek Politik Transaksional Negatif (Politik uang)

✓ Dana Kampanye Haram sebagai Modal Politik

✓ Penggunaan Fasilitas Negara dan Daerah sebagai Instrumen Pemenangan

➔ Latar Belakang

Partisipasi Publik dalam Pengawasan Pemilu

- ❑ Merupakan bagian penting partisipasi masyarakat untuk memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan pemilu
- ❑ Menjaga kontestasi persaingan yang jujur, adil dan berintegritas
- ❑ Melakukan pemantauan secara langsung proses dan tahapan pemilu atas potensi-potensi praktek politik uang dan penyalahgunaan fasilitas dan jabatan pemerintah
- ❑ Melakukan upaya hukum pemilu dengan melakukan pelaporan atas semua bentuk pelanggaran politik uang dan penyalahgunaan fasilitas dan jabatan pemerintah yang ditemukan kepada Bawaslu/ Panwaslu

➔ Durasi dan Metode

- Pemantauan dilakukan sejak

16 Maret 2014

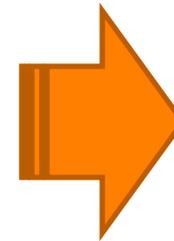
9 April 2014

- ICW membentuk jaringan pemantauan di 15 Provinsi dengan jumlah pemantau sebanyak 15 orang setiap daerahnya.
- Pemantauan dilakukan metode:
 - a. Jaringan pemantauan di 15 provinsi melakukan pemantauan langsung di lapangan saat kampanye kandidat
 - b. Jaringan pemantauan membentuk posko pemantauan untuk menerima informasi dari masyarakat
- Tabulasi pemantauan dilakukan melalui entri data pemantauan di website www.politikuang.net



Daerah Pemantauan dan Jaringan Pemantauan

Aceh	Mata Aceh
Riau	Fitra Riau
Sumatera Utara	Sahdar Sumatera Utara
Sumatera Barat	LBH Sumatera Barat
Bengkulu	Kabahill Bengkulu
Banten	Mata Banten
Jawa Barat	G2W Jawa Barat
Jawa Tengah	KP2KKN Jawa Tengah
Jawa Timur	MCW Jawa Timur
NTB	Fitra NTB
NTT	Bengkel Appek NTT
Kalimantan Barat	Gemawan Kalimantan Barat
Sulawesi Selatan	Yasmib Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara	Puspaham Sulawesi Tenggara
DKI Jakarta	UPC Jakarta



15 Daerah Pemantauan

➔ Mekanisme Pemantauan



Mekanisme Pemantauan

- Pelatihan Nasional dan daerah
- Pemantauan di 15 Provinsi Selama Masa Kampanye, Masa Tenang dan hari "H" Pencoblosan
- Pelaporan kepada Bawaslu/ Panwaslu
- Tabulasi data melalui www.politikuang.net

➔ 4 Fokus Isu Pemantauan



➔ Pengertian Politik uang

- Definisi politik uang hanya ada di Indonesia (Edward Aspinal)
- Karakteristik politik uang menurut Daniel Bumke
 1. *Vote Buying* : merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang dengan suara dalam pemilihan umum
 2. *Vote Broker* : orang yang mewakili kandidat/partai untuk membeli suara
 3. *Korupsi Politik* : segala bentuk suap kepada politisi dalam rangka mendapatkan kebijakan yang menguntungkan atau keuntungan lainnya.

Larangan Kampanye

Pasal 86 Ayat 1 UU No 8 tahun 2012

**Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu
dilarang:**

...

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

J. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu

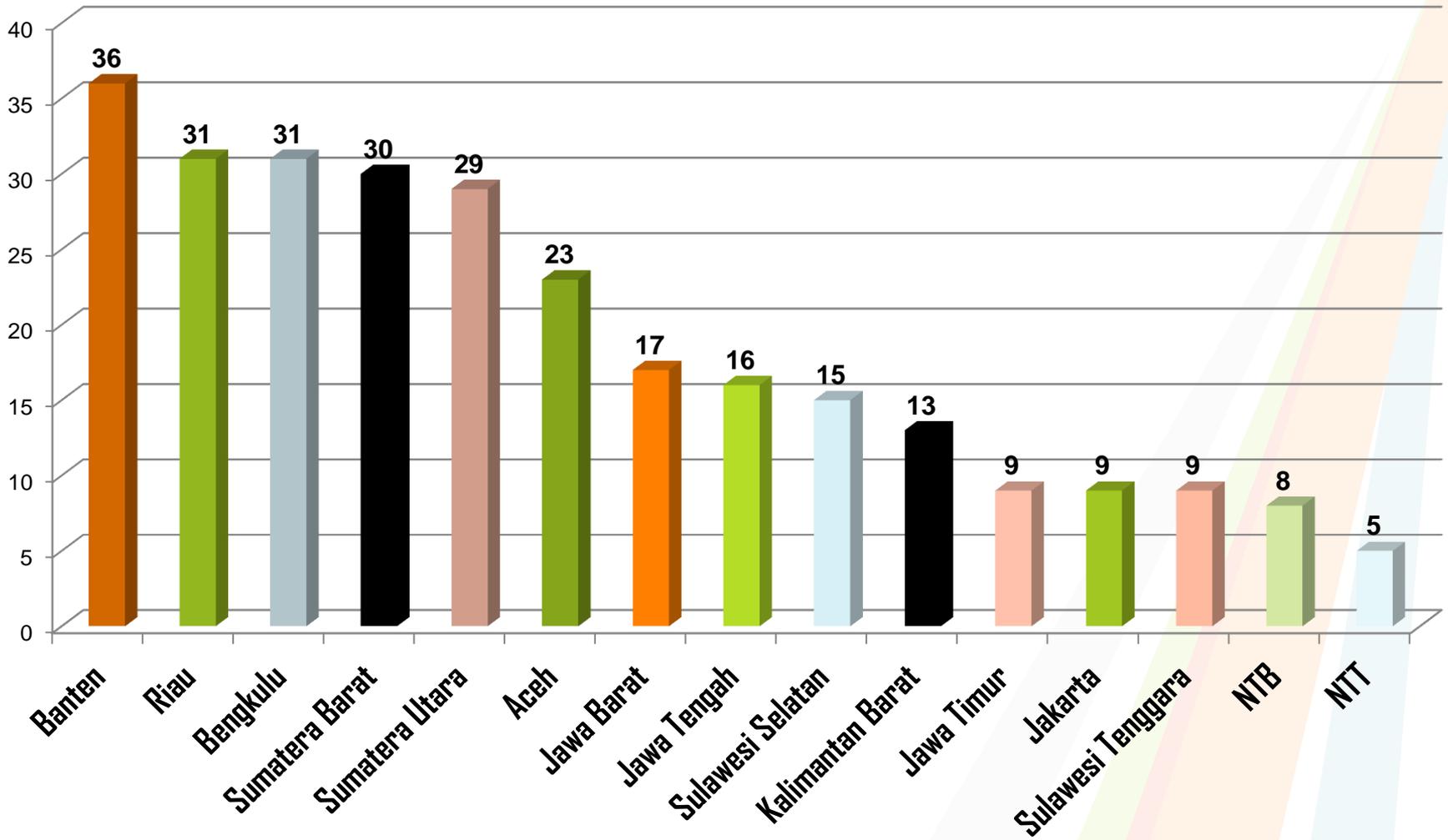


Hasil Pemantauan



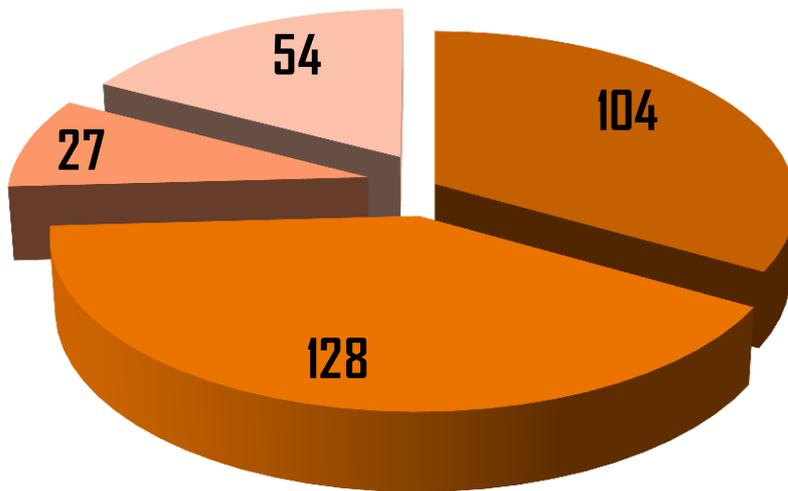


Temuan Berdasarkan Wilayah





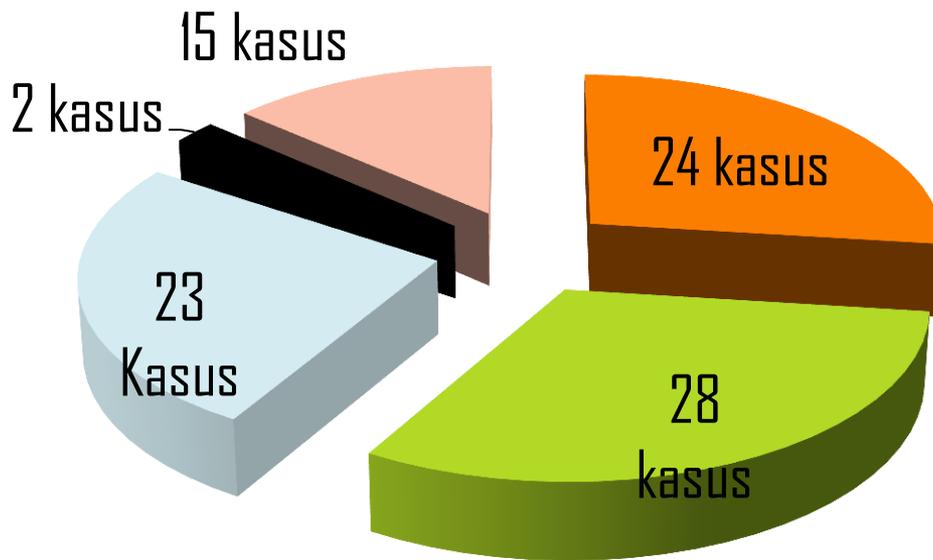
313 Temuan Selama Masa Kampanye- Masa Tenang dan Hari “H” Pencoblosan



Pemberian Uang	104
Pemberian Barang	128
Pemberian Jasa	27
Penggunaan Sumberdaya Negara	54



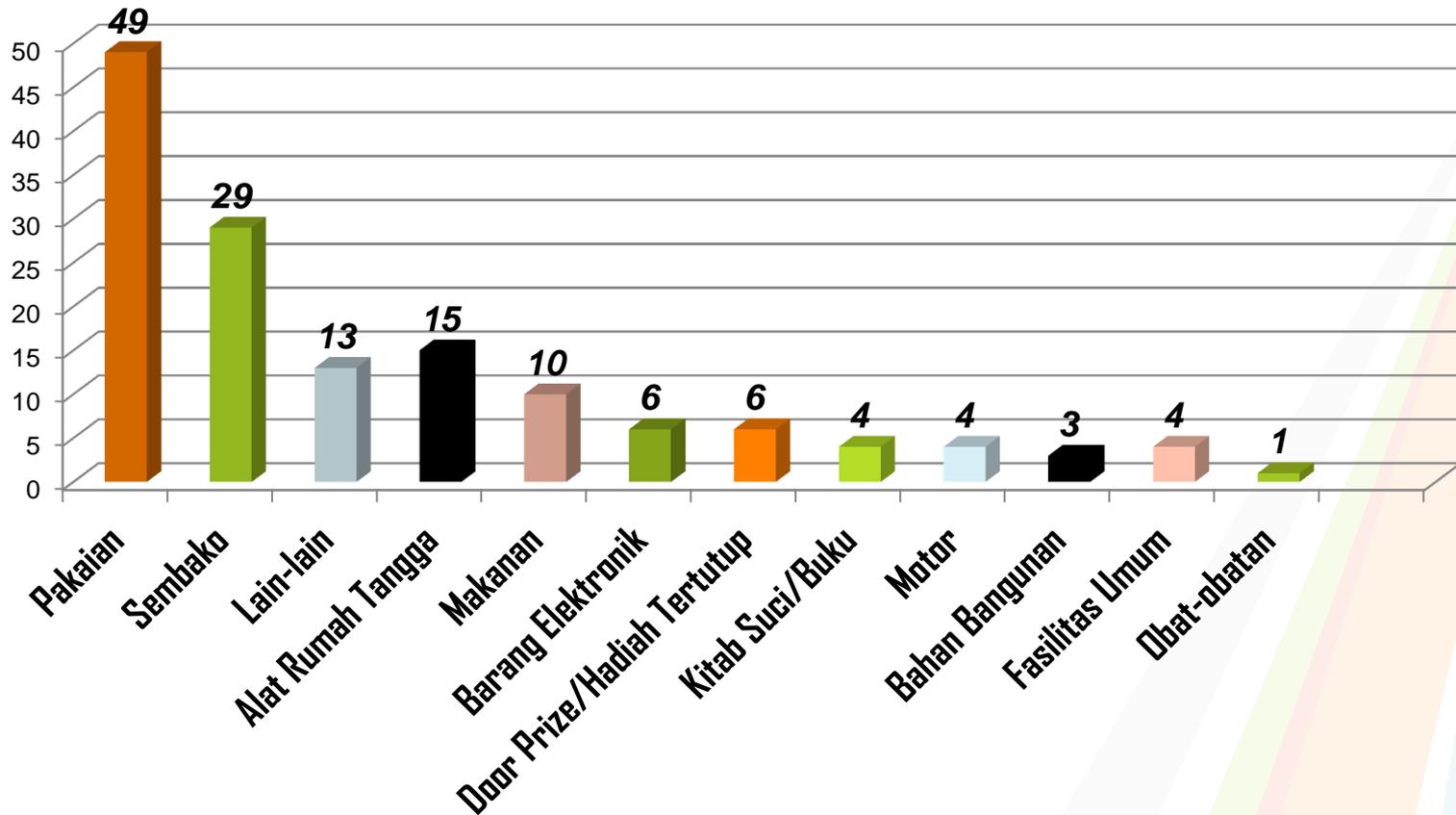
Pemberian Uang Berdasarkan Nominal



0/Tidak diketahui	15
5.000 - 25.000	24
26.000 - 50.000	28
51.000 - 100.000	23
151.000 - 200.000	2
Di atas 200.000	12

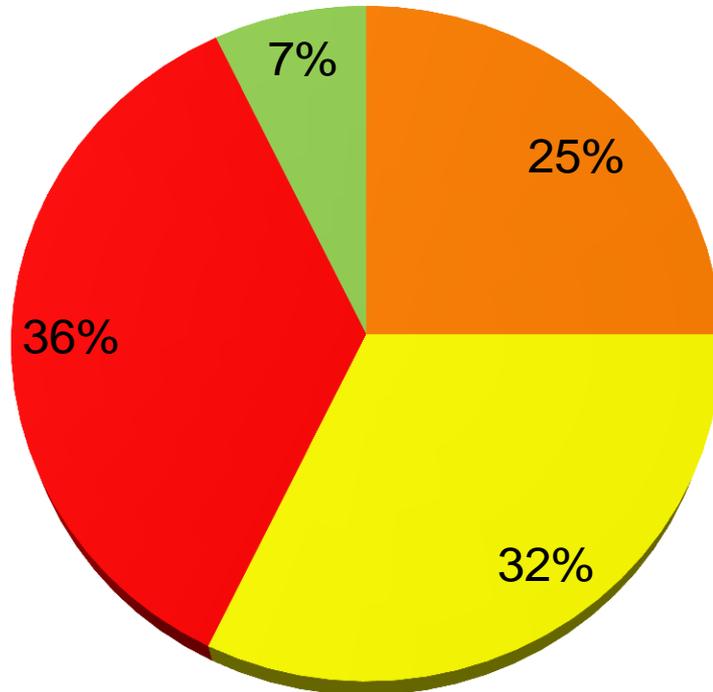
Di Daerah BANTEN banyak ditemukan pemberian dengan nominal Rp 5.000 sampai dengan Rp.25.000

Kategori Pemberian Barang



- Pakaian di atas bukan pakaian dalam bentuk atribut kampanye.
- Sejumlah kandidat memberikan lebih dari satu jenis barang

➔ Kategori Pemberian Jasa



Hiburan/Pertunjukan 7

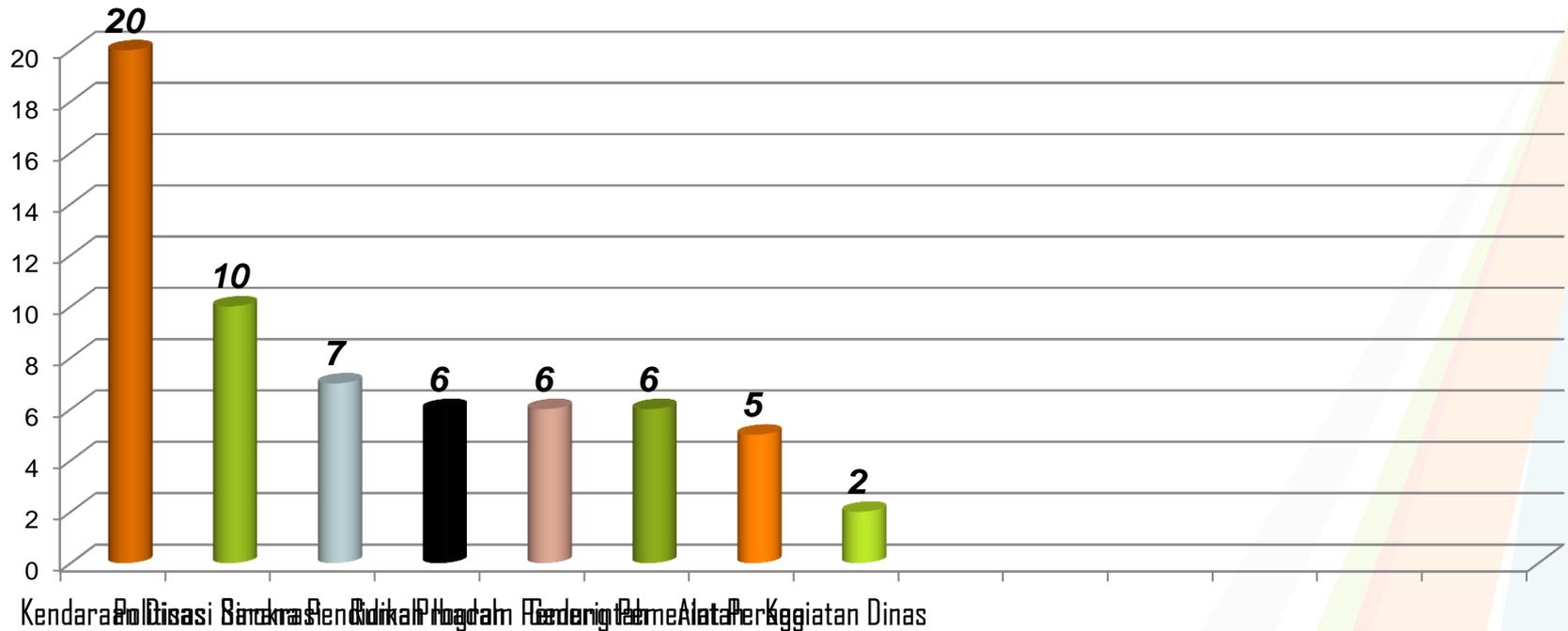
Layanan Kesehatan 9

Janji Uang/ barang 10

Lain-lain 2



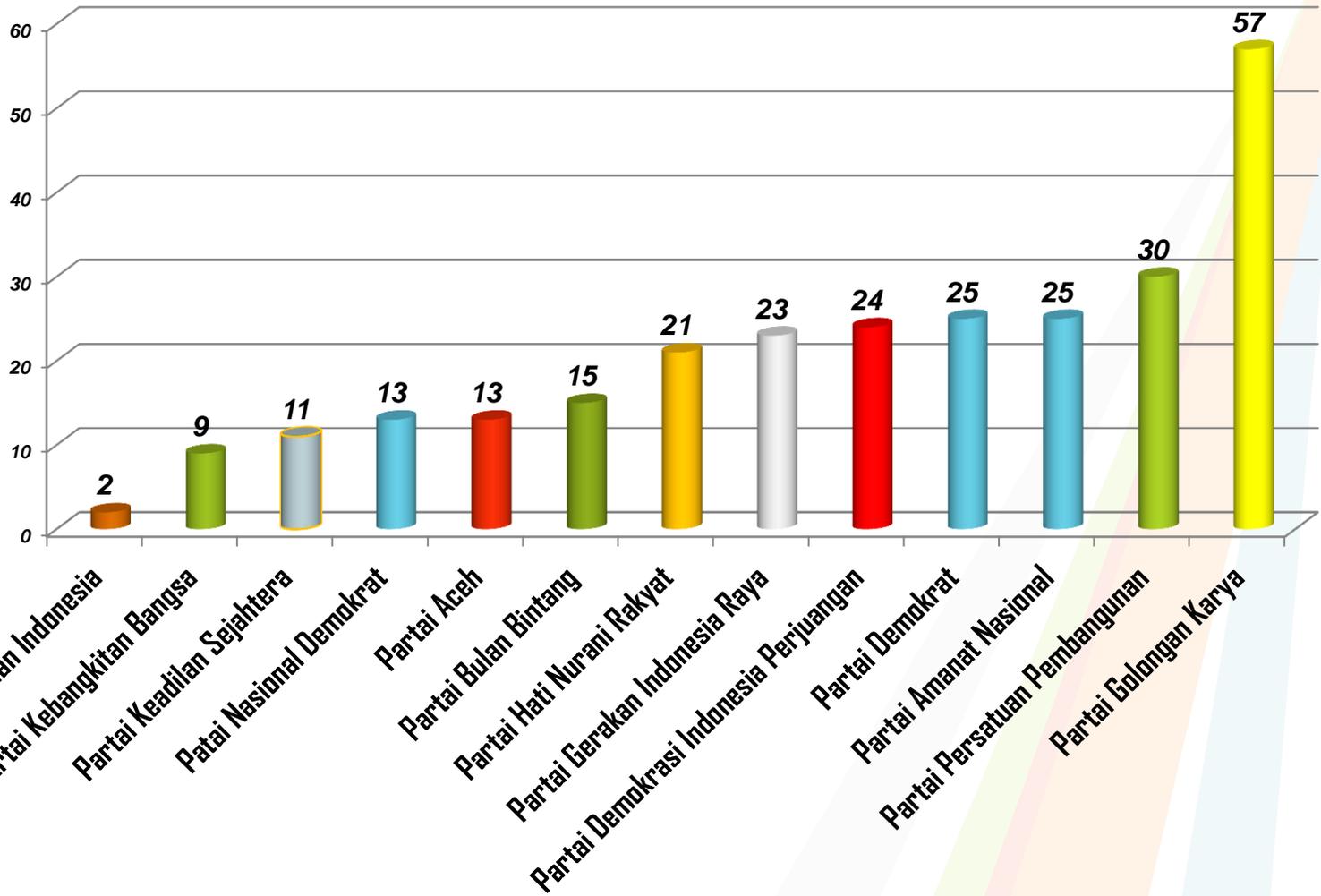
Penggunaan Sumberdaya Negara (*state resources*)



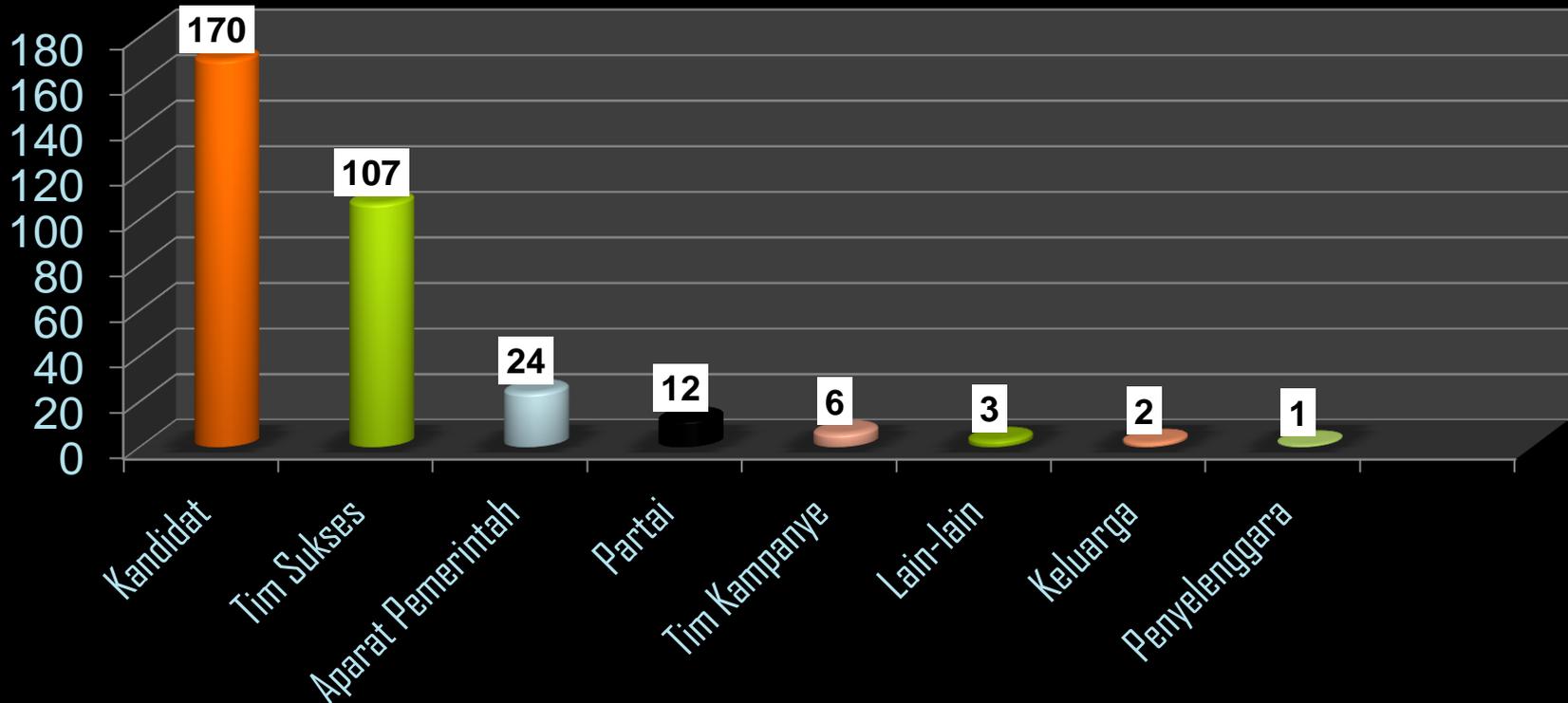
- Politisasi birokrasi dilakukan oleh keluarga kandidat yang sedang menduduki jabatan strategis dengan menggunakan pengaruhnya (*trading in influence*) terhadap birokrat.
- Program pemerintah masih sering dijadikan sebagai modal politik. Misal pembagian kendaraan dinas pada saat kampanye dan instruksi untuk memilih kandidat tertentu



Berdasarkan Latar Belakang Partai



Aktor Pelaku



Temuan ini menunjukkan bahwa kandidat masih menjadi pelaku utama pembagian uang dan barang. Hal tersebut menunjukkan bahwa dominasi logistik masih dikuasai oleh kandidat sendiri.



Pelaku Berdasarkan Tingkat Pencalonan

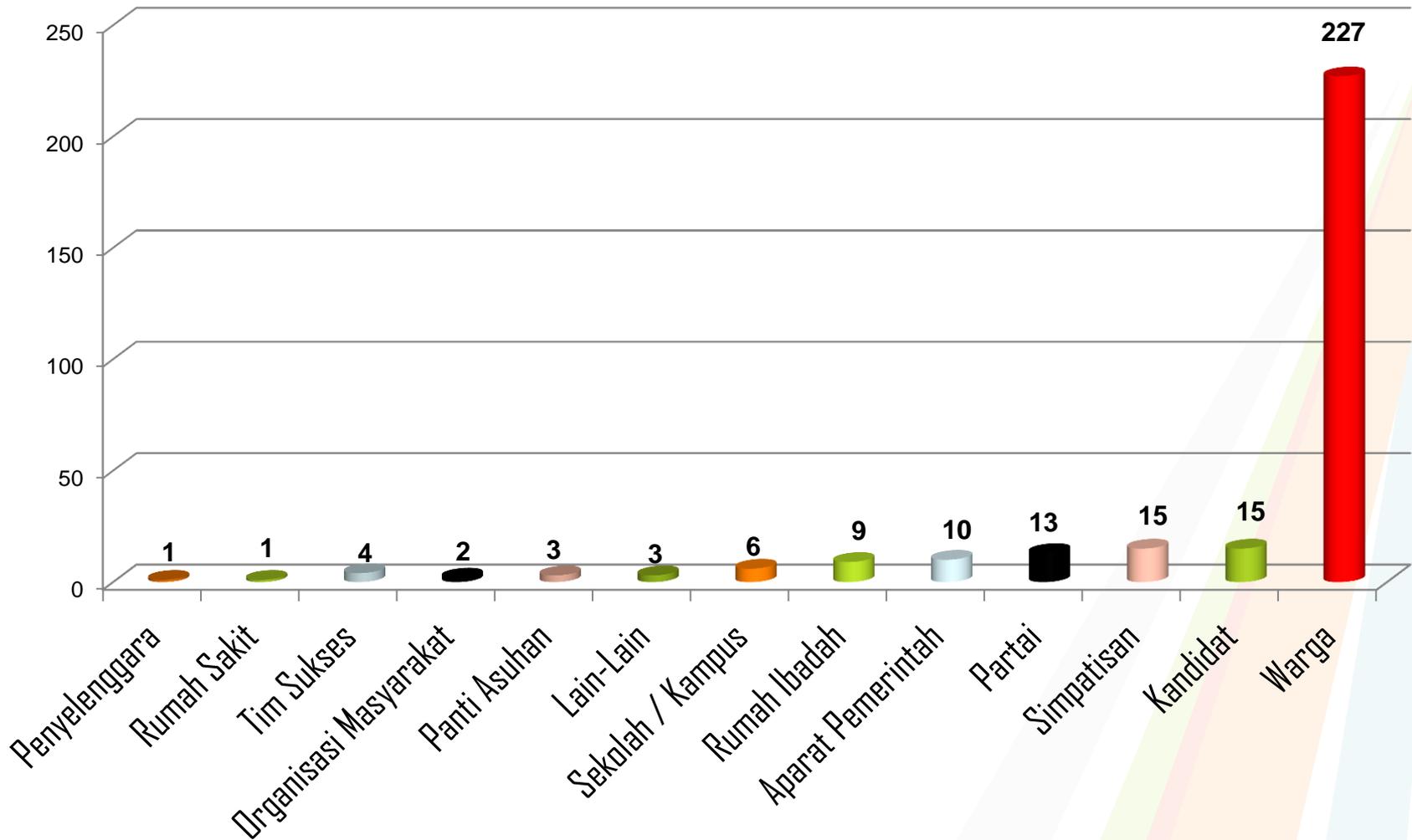


DPRD Kab/ Kota	126
DPR RI	76
DPRD Provinsi	67
DPD DRI	8

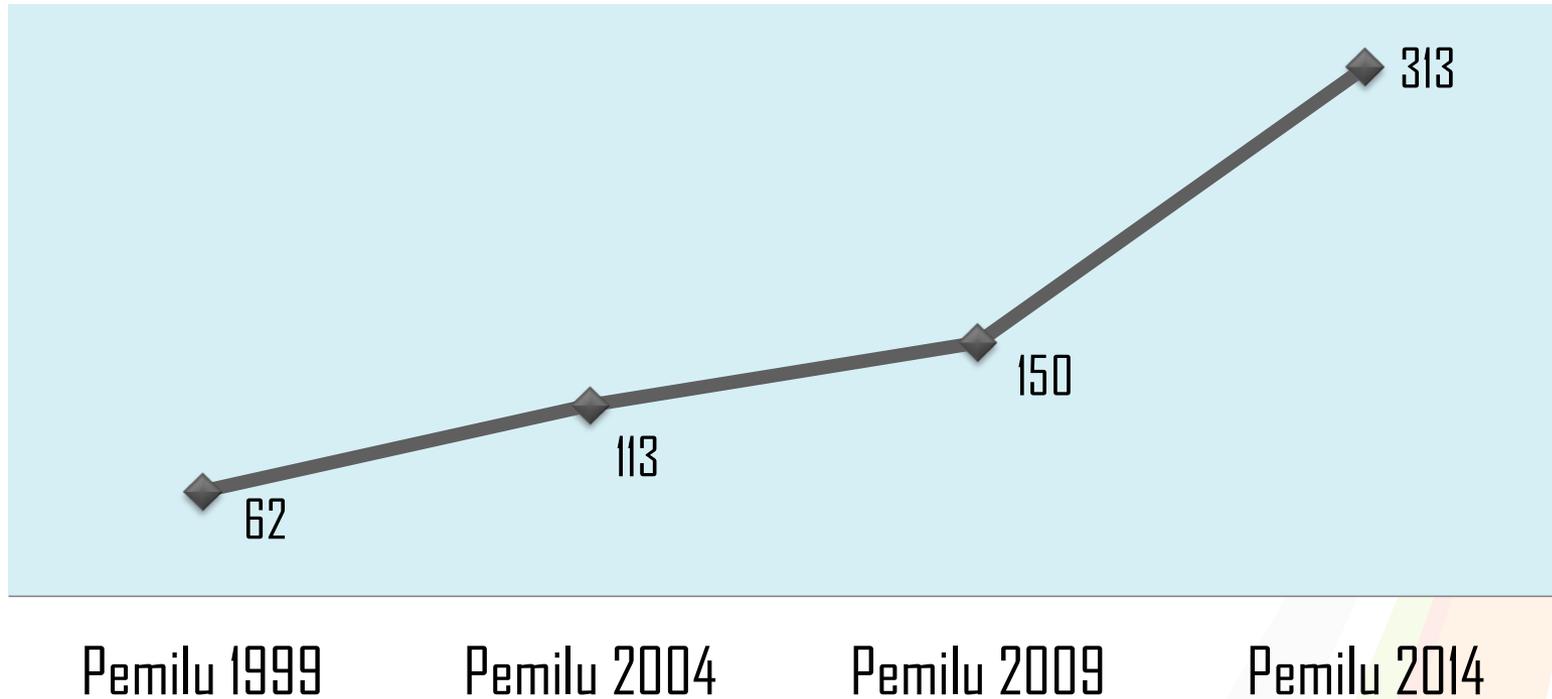
Praktek Pelanggaran pemilu mayoritas terjadi di pencalonan tingkat Kab/Kota. Hal ini disebabkan karena wilayah yang sempit dan persaingan kandidat yang kuat



Aktor Penerima



➔ Politik Uang dari Pemilu



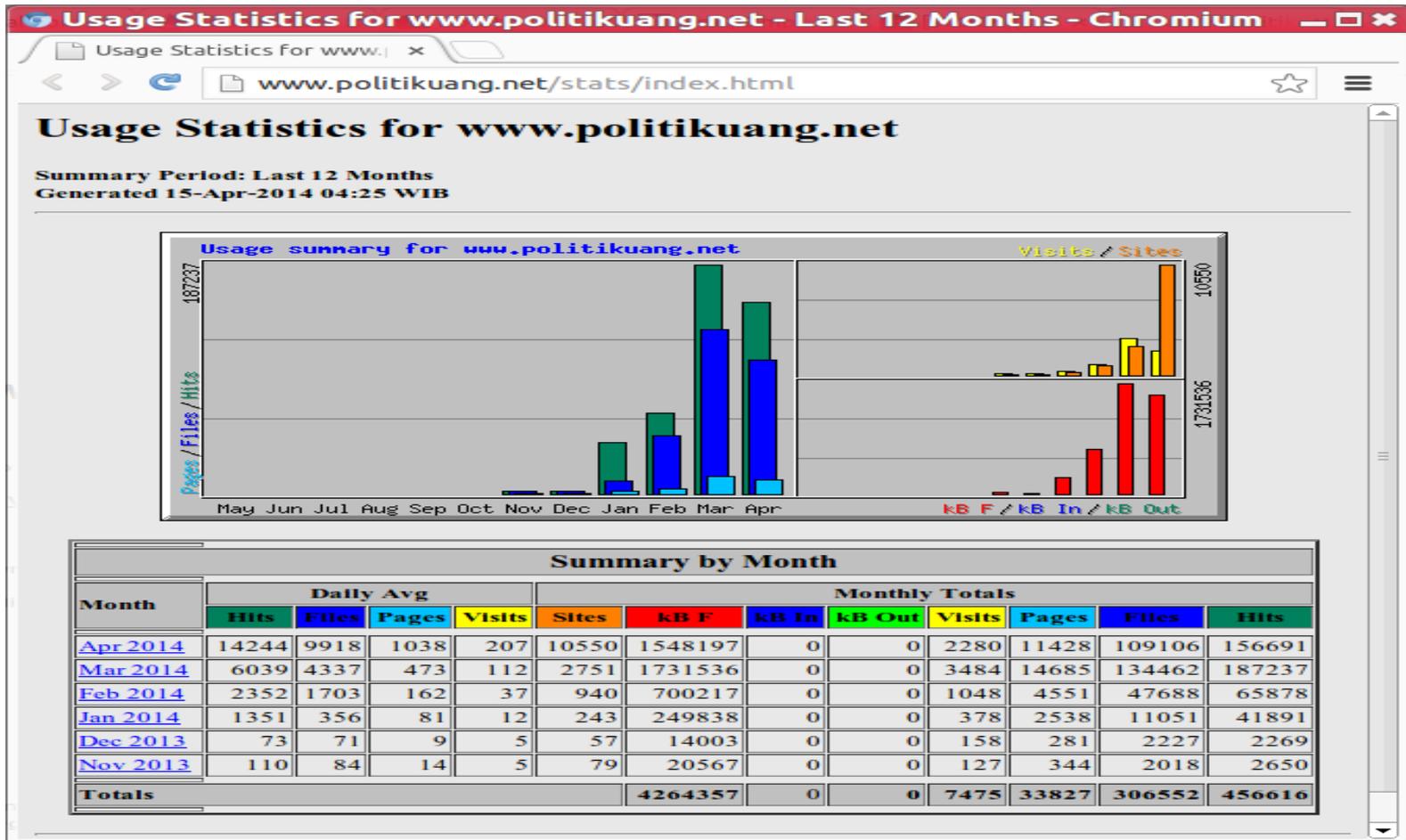
Sumber : ICW 2014. Diolah dari data pemantauan 199,2004,2009 dan 2014

Kesimpulan

- Praktek politik uang masih massif terjadi dalam pemilu legislatif tahun 2014 dengan modus pemberian secara prabayar dan pasca bayar.
- Praktek curang dalam pemilu tertinggi terjadi di pencalonan tingkat kabupaten/kota. Hal ini disebabkan bahwa persaingan di wilayah yang sempit dan kandidat yang banyak mendorong maraknya politik uang.
- Penggunaan kendaraan dinas sering dilakukan secara terselubung dengan cara mengganti nomor polisi mobil dinas tersebut saat kampanye
- Ditemukan sejumlah kasus politisasi birokrasi oleh keluarga/kerabat kandidat yang sedang menduduki jabatan publik
- *State resource* sering dijadikan kandidat incumbent sebagai modal politik



Statistik www.politikuang.net



www.antikorupsi.org



Terimakasih

